

**IMPLEMENTASI INSERSI PENDIDIKAN KEDAMAIAAN (*PEACE EDUCATION*)
MELALUI MATA KULIAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
(Studi Kasus Terhadap Dosen Pengampu Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan
Pada Perguruan Tinggi di Kota Bandung)**

Rizal Fahmi, Nursanda Rizki Adhari, Ilham Aji Pangestu, Zindan Baynal Hubi
Universitas Islam Syekh Yusuf, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis konsep kedamaian untuk dapat diimplementasikan, harmonisasi dan sinkronisasi kedalam konsep pendidikan khususnya Pendidikan Kewarganegaraan. Tidak ada pembangunan berkelanjutan tanpa kedamaian. Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang heterogen, hal ini menjadi perhatian khusus mengingat hal tersebut dapat menjadi faktor pendukung maupun penghambat pembangunan dan kemajuan bangsa. Pendidikan kedamaian merupakan cara yang relevan dalam menanamkan kesadaran hidup yang damai dalam perbedaan. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bidang studi yang dapat menjadi wahana untuk mengimplementasikan pendidikan kedamaian pada sosok Dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di lingkup Perguruan Tinggi, maka perlu adanya usaha pembentukan *good and smart citizenship* yang beratribut kedamaian, maka diperlukan kurikulum yang memuat ide dasar, konsep, prinsip, keterampilan, dan kualitas yang afektif. Berdasarkan perspektif Pendidikan Kewarganegaraan yang akan menjawab permasalahan terkait dengan pengetahuan, kemampuan, nilai-nilai dan sikap kedamaian, maka perlu adanya insersi Pendidikan Kedamaian kedalam suatu kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun metode penelitian yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah studi kasus yang mencakup pengkajian bertujuan memberikan gambaran secara mendetail mengenai latar belakang, sifat maupun karakter yang ada dari suatu kasus, dengan kata lain bahwa studi kasus memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci. Penelitian dalam metode dilakukan secara mendalam terhadap suatu keadaan atau kondisi dengan cara sistematis mulai dari melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi dan pelaporan hasil.

Kata Kunci: Pendidikan Kedamaian, Pendidikan Kewarganegaraan.

PENDAHULUAN

Radikalisme kian menjadi isu yang menarik perhatian dewasa ini, hingga menimbulkan berbagai gerakan seperti anti radikalisme dengan berbagai bentuknya (Faiqah & Pransiska, 2018). Salah satu dari bentuk anti radikalisme (perlawanan terhadap radikalisme) adalah pendidikan anti radikalisme. Siapa saja dapat berasumsi bahwa isu radikalisme yang kian meluas di tanah air sengaja dibuat atau dibesar-besarkan dengan tujuan “menyerang” kelompok-kelompok yang berseberangan kepentingan dengan penguasa. Pada dasarnya berbagai referensi yang tersedia dalam dunia pendidikan tidak banyak yang membahas mengenai apa itu radikalisme dan anti radikalisme, pengertian seperti pendidikan anti kekerasan atau pendidikan moral lebih banyak digunakan pada referensi yang ada (Yudi, 2019). Ditinjau dari sebab utama munculnya gerakan anti radikalisme adalah radikalisme itu sendiri. Tanpa adanya gerakan radikalisme menimbulkan konsekuensi pada tidak pernah terciptanya gerakan anti radikalisme. Sama halnya seperti teori Hegelian yang mana tercipta anti tesis karena adanya tesis. Dari tukar tambah tesis dan antithesis akan menimbulkan sintesis sebagai suatu kesimpulan yang baru.

Terlepas dari konstelasi kehidupan sosial politik bangsa Indonesia yang semakin berdinamika, adanya gerakan anti radikalisme secara tidak langsung mengakui adanya radikalisme. Adanya sekelompok orang yang

membuat suatu gerakan akan berdasar pada keyakinan mereka bahwasanya melalui tindakan tersebut merupakan cara terbaik untuk mencapai tujuan atau cita-cita tertentu dan di sisi lain (Ramdhani dan Novian, 2020). Gerakan anti radikalisme berusaha untuk membatalkan dalil-dalil radikalisme terutama radikalisme. Tindakan (terorisme) karena pada dasarnya Pendidikan anti radikalisme menekankan pentingnya sikap saling menghargai dan perdamaian sesuai yang diajarkan oleh kitab suci (Octaviani, Sari, & Hidayatullah, 2021).

Baik dan buruknya gerakan anti radikalisme masih terus menjadi diskursus dalam dunia intelektual, karena pada dasarnya jika radikalisme dapat dicegah dan tidak pernah menjadi gerakan radikal itu, maka gerakan anti radikalisme akan turun secara tegak lurus. Misalnya saja pada dunia kampus, pemerintah telah membuat berbagai kebijakan mengenai etika hukum dan kebijakan karakter mahasiswa dimana semua itu menekankan terciptanya sikap nasionalisme dan anti-radikal (Rodiyah, dkk, 2019). Pada dasarnya terdapat suatu konsepsi yang harus diajarkan pada anak bangsa dalam menjaga keutuhan dan persatuan bangsa yakni mengenai konsepsi kedamaian. Untuk mencapai kedamaian maka berkembang dua teori, yakni perdamaian secara negative (negative peace) dan perdamaian secara positif (positive peace) (Barash, dkk, 2014).

Pendidikan perdamaian (peace education) menjadi salah satu tema yang banyak

diteliti serta dikembangkan dewasa ini (Machali, 2013; Hasudungan, Sariyatun, & Joebagio, 2019; Budiarti, 2018), karena pendidikan perdamaian memiliki subsatnsi tentang penanaman nilai-nilai persatuan bangsa tanpa konflik. Sejarah telah menortehkan soal arogansi dan kekerasan (violence) dalam setiap babakanya. Peralihan kekuasaan, pemberontakan, penurunan rezim hingga Gerakan separatis yang kebanyakannya diselesaikan dengan cara-cara kekerasan, dimana pada dasarnya kekerasan itu sendiri merupakan bentuk ketidaksetaraan atau adanya diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Hearn, dkk, 2020).

Keberhasilan dari pendekatan represif tidak sedikit menimbulkan dampak buruk yang lebih banyak daripada dampak baik (Ramdhani, 2019). Sejarah juga telah mencatat bahwa banyak persoalan bangsa yang akhirnya dapat diselesaikan bukan dengan cara-cara bernotasi kekerasan namun melalui pendekatan diplomatis (Dixon, 1994). Selain melihat tindak kekerasan (violence) dalam skala mikro, tindakan kekerasan dalam skala mikro juga banyak ditemui dalam kehidupan bermasyarakat pada semua lapisan dan usia. Hal tersebut menandakan pendidikan perdamaian memiliki urgensi yang kian besar dalam upaya melakukan transotmasi pemikiran, tindakan dan keterampilan warga negara untuk hidup

denegan penuh perdamaian dan berupaya melakukan kekerasan dan konflik.

Pada dasarnya dunia pendidikan memiliki peranan besar dalam melakukan internalisasi pendidikan perdamaian kepada peserta didik sejak dini (Sukitman, 2016), karena pada dasarnya seseorang akan tumbuh Bersama nilai-nilai yang ia terima, oleh karena itu, penanaman nilai-nilai baik seperti Pendidikan perdamaian menjadi sangat penting untuk diimpelemntasikan. Misalnya yang dilakukan oleh Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdatul Ulama Jawa Tengah yang telah serius melakukan Pendidikan anti radikalisme yang dituangkan dalam kurikulum hingga bahan ajar (Ibda, 2019).

Pada perguruan tinggi, mahasiswa menjadi bagian dari kelompok intelektual (intellectual community) karena memiliki daya pikir dan daya kritis yang tinggi (Hudiarini, 2017). Meskipun begitu, bukan berarti mahasiswa sudah dianggap sempurna dalam persoalan karakter bahkan sikap-sikap yang menyimpang. Pada beberapa tren yang terjadi, kita akan menemukan banyaknya kasus terorisme dilakukan oleh mahasiswa bahkan radikalisme disebut-sebut tumbuh subur di kampus. Misalnya salah satu organisasi yang tumbuh dan berkembang di kampus yakni Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang tidak mau menjadi moderat dengan menerima system politik yang ada, namun lebih memilih radikal dan ekstrimis secara

formal dengan terus melakukan agenda-agenda yang tersembunyi (Arifianto, 2019).

Meskipun hal tersebut dapat dipandang sebagai suatu kontradiksi, karena pada hakikatnya mahasiswa sudah mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, namun itulah realitas yang terjadi dan mungkin dapat dikatakan bahwa sedikit banyak kampus belum berhasil membentuk karakter mahasiswa yang nasionalis. Oleh karena itu diperlukan suatu Tindakan (treatment) untuk menanggulangi tindak kekerasan yang dilakukan oleh mahasiswa. (Fahmi & Ikbal, 2020)

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah satu mata kuliah wajib memiliki andil besar dan strategis dalam melakukan upaya internalisasi Pendidikan perdamaian kepada para mahasiswa (Mentari, Yanzi, & Putri, 2021), karena dari segi konten materi maupun tujuan perkuliahan memiliki korelasi dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap warga negara (civic skill, civic knowledge and civic disposition) yang merepresentasikan manusia Pancasila (Fahmi & Nadya, 2021). Meskipun tugas internalisasi Pendidikan kedamaian tidak seluruhnya menjadi kewajiban dosen pengampu Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, namun dosen PKN memiliki tanggung jawab yang lebih dibandingkan dosen mata kuliah lainnya karena adanya korelasi dan tugas pencapaian

kompetensi mahasiswa setelah mengikuti kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, oleh karena itu sangat layak jika dosen PKN dijadikan sebagai tolak ukur insersi Pendidikan kedamaian dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus pada progresifitas dosen PKN di beberapa perguruan tinggi di Kota Bandung dalam melakukan insersi (penyisipan) Pendidikan kedamaian tersebut.

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang tidak terbatas pada kategori tertentu dalam pengumpulan data. Metode penelitian menggunakan studi kasus yang hasil studi kasusnya merupakan generalisasi dari pola kasus yang khas dari individu, kelompok atau institusi (Moh. Nazir, 2011). Lokasi penelitian ini adalah Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan wawancara terbuka, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data relevan untuk menjelaskan masalah penelitian karena akan lebih bersifat eksploratif.

Data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan reduksi data,

penyajian data dan penarikan kesimpulan. Analisis data tersebut sangat penting untuk memilah data, mempertajam data dan mengkategorikan data sesuai dengan permasalahan penelitian. Jenis analisis data dalam penelitian ini adalah analisis isi yang tidak hanya berupa teks, melainkan konteks (White dan Marsh, 2006). Sehingga peneliti melihat hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dalam melakukan analisis.

Jenis analisis yang digunakan adalah deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan aspek-aspek yang berkaitan dengan pendidikan kedamaian, dan analisis hasil menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan mengenai implementasi pendidikan kedamaian dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan didapatkan berbagai fakta mengenai insersi pendidikan kedamaian dalam pembelajaran pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, yang mencakup beberapa hal, pertama mengenai

pengetahuan secara umum para dosen mengenai konsepsi pendidikan kedamaian. Kedua mengenai internalisasi pendidikan kedamaian pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dan ketiga adalah faktor-faktor determinan internalisasi Pendidikan kedamaian melalui insersi pada pendidikan kewarganegaraan.

Dalam konteks pengetahuan para dosen mengenai pendidikan kedamaian, secara umum para dosen mengetahui makna dari Pendidikan kedamaian dengan membuat terminology sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki. Namun secara konseptual, para dosen belum mengetahui secara utuh mengenai Pendidikan kedamaian itu sendiri. Hal tersebut bersumber pada wawancara yang dilakukan terhadap para narasumber.

Ketidaktahuan terhadap konsep pendidikan kedamaian secara utuh disebabkan pada beberapa hal, yaitu: 1) kurangnya referensi mengenai Pendidikan kedamaian sebagai suatu wacana kritis dalam dunia Pendidikan; 2) belum adanya sosialisasi dari pihak terkait terutama pemerintah mengenai Pendidikan kedamaian; 3) belum adanya informasi utuh baik berupa booklet dan sejenisnya yang menerangkan tentang Pendidikan kedamaian dan; 4) pembangunan wacana Pendidikan kedamaian yang kurang massif.

Setelah dijelaskan secara cukup terperinci, akhirnya para narasumber

memahami mengenai pendidikan kedamaian yang dimaksud. Melalui diskusi yang dilakukan tersebut, maka konsepsi mengenai Pendidikan kedamaian dapat dipahami secara holistic. Berdasarkan pengamatan terhadap para narasumber, nampaknya tidak sulit bagi para dosen mata kuliah pendidikan Kewarganegaraan untuk memahami konsepsi Pendidikan kedamaian tersebut, pasalnya Pendidikan kedamaian sendiri tidak terlepas dari materi Pendidikan kewarganegaraan.

Secara teoritis, muatan nilai-nilai yang terdapat dalam pendidikan kedamaian sangat berkaitan erat dengan kondisi keberagaman bangsa Indonesia itu sendiri serta karakteristik masyarakat Indonesia yang pada dasarnya sangatlah ramah (Kartadinata, et. al, 2016), sehingga dalam konteks kognitif sendiri, Pendidikan kedamaian tidaklah sulit untuk diinternalisasikan terhadap para mahasiswa.

Inseri atau penyisipan Pendidikan kedamaian sendiri secara langsung telah terintegrasi pada materi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Secara eksplisit, muatan materi pendidikan kedamaian terdapat pada materi mengenai hak asasi manusia dan toleransi, tanggungjawab warga negara, cinta tanah air dan bangsa, upaya bela negara/ ketahanan nasional dan materi terkait lainnya sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang

terdapat pada kampus masing-masing, namun secara garis besar pendidikan kedamaian sangat berkaitan erat dengan pengetahuan, sikap dan kemampuan warga negara untuk berkepribadian atau berkarakter baik, bijaksana dan toleran (Saripudin dan Komalasari, 2015). Menghindari kekerasan hingga permusuhan dan perpecahan / disintegrasi sebagai suatu akibat yang lebih besar lagi.

Penelitian tidak dapat melakukan rekayasa atas pelaksanaan inseri Pendidikan kedamaian dilakukan pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, karena secara teknis belum ditetapkan secara resmi oleh pemerintah ataupun pihak pengembang kurikulum. Namun penelitian ini berhasil menemukan mengenai pelaksanaan pendidikan kedamaian yang materinya termuat dalam materi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, sehingga jika dilihat secara substansial dapat kita pahami bahwa pendidikan kedamaian itu sudah diajarkan oleh para dosen Pendidikan Kewarganegaraan sejak lama, meskipun istilah tersebut masih asing didengar. Oleh karena itu, peneliti dapat memaparkan beberapa hal mengenai pelaksanaan inseri pendidikan kedamaian melalui mata kuliah pendidikan kewarganegaraan.

Berdasarkan pada instrument pembelajaran mata kuliah PPKn di beberapa kampus, maka mewujudkan warga negara

yang bertanggung jawab serta sadar dalam upaya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Proses perkuliahan pendidikan kewarganegaraan yang dilaksanakan oleh para subjek penelitian secara umum dapat dilaksanakan secara baik. Inseri esensi pendidikan kedamaian dapat diterima oleh para mahasiswa dengan sangat baik, karena materi-materi yang termuat dalam mata kuliah berorientasi pada pembangunan mental attauy karakter warga negara yang beradab. Selain itu, muatan materi hak asasi manusia menjadi bagian yang sangat penting pada perkuliahan di beberapa kampus pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan.

Bagian pelajaran mengenai hak asasi manusia secara langsung memberikan tiga hal penting terutama pada mahasiswa yang sangat berkorelasi dengan Pendidikan kedamaian. Pertama adalah kesadaran yang tumbuh sebagai manusia serta memandang kesetaraan dalam kehidupan. Kedua adalah tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan pada cara berpikir para mahasiswa, sehingga tumbuh rasa saling menyayangi dan penghormatan atas rasa kemanusiaan dan ketiga adalah tumbuhnya sikap empati terhadap para korban pelanggaran hak asasi manusia dimana hal tersebut sangat menyakitkan dan menjadi bagian kelam dalam sejarah kemanusiaan.

Terjadinya banyak pelanggaran HAM tidak terlepas dari adanya tindak

kekerasan, diskriminasi dan perbedaan kepentingan sehingga kekerasan dijadikan cara alternatif untuk meredam bahkan menjadikan lawannya tidak ada lagi. Dipandang dari sudut pandang manapun dalam perspektif hak asasi manusia, maka sangat jelas jika kekerasan tidak dibenarkan. Akhirnya tumbuh suatu kesadaran kolektif pada mahasiswa bahwasanya cara-cara damai hendaknya selalu menjadi cara yang ditempuh bangsa Indonesia dalam menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi. Akhirnya dapat kita pahami bahwa disanalah muncul salah satu urgensi untuk hadirnya Pendidikan kedamaian.

Kedua, bahwa materi hak asasi manusia membentuk suatu pola pikir yang toleran dan plural. Mahasiswa mendapatkan suatu pengetahuan bahwa kemanusiaan dapat menjadi lebih penting di atas segala-galanya (humanisme). Identitas parsial yang dimiliki oleh manusia terkadang menjadikan kehidupan manusia menjadi terkotak-kotak seakan berbeda satu sama lain bahkan karena identitas itu pula banyak terjadi konflik horizontal antar kelompok atau individu di masyarakat kita..`Ketiga bahwa materi hak asasi manusia secara tidak langsung memberikan panduan atau pedoman dalam berkehidupan sebagai sesame manusia, sehingga dapat meminimalisir perbuatan-perbuatan yang tidak manusiawi.

Namun dibalik itu semua, tentunya

terdapat beberapa hal yang menjadi hambatan atau tantangan dalam melakukan insersi pendidikan kedamaian pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Hambatan tersebut terbagi menjadi dua yakni hambatan yang bersifat teknis dan hambatan yang bersifat substantif. Hambatan secara substantif terdiri atas beberapa factor. Pertama adalah belum adanya pengetahuan utuh yang dimiliki oleh para pengajar mata kuliah PKn mengenai Pendidikan kedamaian, sehingga insersi yang dilakukan tidak dapat berjalan secara optimal. Pelatihan atau penataran para dosen Pendidikan Kewarganegaraan untuk mendapatkan pengetahuan utuh tentang Pendidikan Kedamaian menjadi salah satu Langkah nyata, sehingga insersi Pendidikan kedamaian tersebut dapat terlaksana secara optimal.

Kemudian, adanya potensi untuk terjadinya bias soal Pendidikan kedamaian menjadikan hambatan lain yang bersifat substansial. Pada dasarnya bias materi merupakan akibat yang disebabkan oleh factor lain, namun dapat juga menjadi factor penghambat dalam mewujudkan tujuan Pendidikan kedamaian secara umum. Bias materi dapat berupa pemahaman yang salah mengenai konsep-konsep dasar kedamaian itu sendiri, sehingga dapat berdampak pada ranah pengetahuan yang lain.

Adapun hambatan yang bersifat teknis terdiri dari tiga factor. Pertama

adalah belum adanya aturan teknis yang jelas mengenai petunjuk pelaksanaan dan teknis Pendidikan kedamaian di kampus, sehingga para pimpinan kampus hingga program studi belum dapat mengambil keputusan untuk melakukan langkah-langkah yang lebih jauh. Kedua yakni belum adanya sumber referensi yang memadai mengenai Pendidikan ketahanan itu sendiri. Tidak sulit bagi para akademisi baik dosen maupun mahasiswa untuk memahami dan mengembangkan materi mengenai Pendidikan kedamaian. Ketiga adalah belum adanya kurikulum integrasi yang dibuat, sehingga para dosen belum dapat melaksanakan insersi Pendidikan ketahanan itu secara lebih terarah, karena belum adanya indicator-indikator pencapaian yang ditetapkan.

Dari berbagai factor yang menghambat implementasi insersi Pendidikan ketahanan dalam mata kuliah Pendidikan kewarganegaraan, terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak. Pertama adalah adanya regulasi atau arahan dari pemerintah mengenai pelaksanaan insersi Pendidikan ketahanan melalui Pendidikan kewarganegaraan sehingga para dosen khususnya dapat menerjemahkan dan melaksanakan insersi Pendidikan ketahanan tersebut. Kedua adalah diadakannya semacam modul atau panduan pelaksanaan insersi Pendidikan ketahanan. Dengan adanya langkah yang lebih nyata, maka

implementasinya akan semakin baik seiring dengan pemahaman dan implementasinya yang utuh dan terarah.

KESIMPULAN

Penelitian ini memberikan beberapa kesimpulan, pertama bahwa insersi Pendidikan ketahanan pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan belum dilaksanakan secara sistematis akibat belum adanya petunjuk atau pedoman pelaksanaan program tersebut. Namun secara non formal, terdapat cukup banyak materi pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang berkorelasi dengan materi-materi Pendidikan Kedamaian, sehingga insersi tersebut secara umum telah dilaksanakan oleh para dosen Pendidikan Kewarganegaraan yang diinternalisasikan terhadap para mahasiswa.

Kedua, secara umum para dosen belum memahami secara mendalam tentang konsepsi Pendidikan Kedamaian, namun setelah dijelaskan tidak sulit bagi para dosen untuk memahami muatan dari materi Pendidikan kedamaian tersebut. Hingga saat ini, konsepsi Pendidikan kedamaian sendiri masih asing dikalangan kaum akademisi termasuk para dosen PKN khususnya pada kampus-kampus yang dijadikan subjek penelitian. Sehingga secara garis besar, perlu adanya suatu penataran atau pemberian modul sebagai pedoman insersi Pendidikan

ketahanan melalui mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan.

Ketiga, terdapat dua jenis hambatan yang mengakibatkan implementasi dari Pendidikan kedamaian ini belum dapat terlaksana dengan baik yakni kendala yang bersifat substansial dan kendala yang bersifat teknis. Kendala tersebut muncul sebagai akibat dari belum tersosialisasikannya Pendidikan kedamaian itu sendiri terhadap para dosen pengampu Pendidikan Kewarganegaraan, sehingga sosialisasi dan penataran Pendidikan kedamaian menjadi salah satu cara yang dinilai akan sangat efektif guna menunjang terselenggaranya program ini dengan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifianto, A. R. (2019). Islamic campus preaching organizations in Indonesia: Promoters of moderation or radicalism?. *Asian Security*, 15(3), 323-342.. DOI: <https://doi.org/10.1080/14799855.2018.1461086>
- Barash, David P. & Webel, Charles. P. (2014). *Peace and conflict studies (third edition)*. Sage Publication. Tersedia di http://www.sagepub.com/upmd-ata/55624_Chapter_1.pdf
- Budiarti, T. (2018). *Model-Model*

- Pendidikan Perdamaian Bagi Anak Dalam Konteks Gereja. *Jurnal Jaffray*, 16(1), 55-76.
- Dixon, W. J. (1994). Democracy and the peaceful settlement of international conflict. *American political science review*, 88(1), 14-32.
- Faiqah, N., & Pransiska, T. (2018). Radikalisme Islam Vs Moderasi Islam: Upaya Membangun Wajah Islam Indonesia Yang Damai. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 17(1), 33-60.
- Fahmi, R., & Ikbal, A. (2020). Pembelajaran Berbasis Nilai-nilai Kebangsaan: Suatu Strategi dalam Menangkal Radikalisme di Persekolahan. *Jurnal IKRA-ITH Humaniora*, 4(3), 135– 144.
- Fahmi, R., & Nadya, A. (2021). JPK : Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(1), 65–77. <https://doi.org/10.24269/jpk.v6.n2.2021.pp33-42>
- Hasudungan, A. N., Sariyatun, S., & Joebagio, H. (2019). Pengarusutamaan pendidikan perdamaian berbasis kearifan lokal pela gandong pasca rekonsiliasi konflik Ambon di sekolah. *Jurnal Lektur Keagamaan*, 17(2), 409-430.
- Hearn, J., Strid, S., Humbert, A. L., Balkmar, D., & Delaunay, M. (2020). From gender regimes to violence regime. *Social Politics*. DOI: <https://doi.org/10.1093/sp/jxaa022>
- Hudiarini, S. (2017). Penyertaan etika bagi masyarakat akademik di kalangan dunia pendidikan tinggi. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 2(1), 1-13.
- Ibda, H. (2019). The Strategy of the Educational Institution Ma'arif Nahdlatul Ulama of Central Java In Preventing Radicalism.”. *Borneo International Journal of Islamic Studies*, 1(2), 107-128. Tersedia: <https://bijis.iain-samarinda.ac.id>
- Kartadinata, S., Suherman, U., Ilfiandra, I. S., Setiadi, R., Ropo, E., & Syrjäläinen, E. (2016). Exploring the values of peace in the cultural contexts of Indonesian and Finnish schools: A study of the development of peace pedagogy. *Man in India*, 96(5), 1485- 1504.
- Machali, I. (2013). Peace education dan deradikalisasi agama. *Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 41- 64.
- Mentari, A., Yanzi, H., & Putri, D. S. (2021). Implementasi Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 10(1), 1-8.
- Moh. Nazir. (2011). *Metode Penelitian*. Bogor: Penerbit Ghalia

Indonesia.

- Octaviani, L., Sari, D. N. I., & Hidayatullah, A. F. (2021). The Development Of Radical Islamic Movements And The Importance Of Anti-Radicalism Education At The High School Level In Indonesia. *Jurnal Pertahanan: Media Informasi ttg Kajian & Strategi Pertahanan yang Mengedepankan Identity, Nasionalism & Integrity*, 7(2), 368-375.. DOI: <http://dx.doi.org/10.33172/jp.v7i2.1097>
- Ramdhani, H. (2019). Revitalisasi Program Deradikalisasi Berbasis Pendekatan Non Penal di Perguruan Tinggi. *Jurnal Civicus*, 19(2), 8-13.
- Ramdhani, H., & Novian, R. M. (2020). Actualization of Political Education in Digital Learning to Prevent Radicalism. *IJECA (International Journal of Education and Curriculum Application)*, 3(2), 98-103.
- Rodiyah, R., Laskarwati, B., Masyhar, A., & Waspiyah, W. (2019). How Should Student Behave? A Legal Ethics and Policy towards Nationalism and Anti-Radicalism Characters. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 4(2), 259. DOI: <http://dx.doi.org/10.15294/jils.v4i2.34343>
- Rohman, F. (2018). Pendidikan Islam Anti Radikalisme Melalui Nadham (Telaah Kitab Shifa'al-Ummah karya KH. Taufiqul Hakim Bangsri Jepara). *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam*, 13(1), 133-148.
- Saripudin, D., & Komalasari, K. (2015). Living values education in school's habituation program and its effect on student's character development. *The New Educational Review*, 39(1), 51-62.
- Sukitman, T. (2016). Internalisasi Pendidikan Nilai dalam Pembelajaran (Upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkarakter). *Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar Ahmad Dahlan*, 2(2), 85-96.
- White, M. D., & Marsh, E. E. (2006). Content analysis: A flexible methodology. *Library trends*, 55(1), 22-45.
- Yudi, N. (2019, February). Islamic References on Anti-Radicalism in Indonesia: Information Repackaging for Education System. In 2nd Internasional Conference on Culture and Language in Southeast Asia (ICCLAS 2018) (pp. 214-218). Atlantis Press. DOI: <https://doi.org/10.2991/icclas-18.2019.55>